

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah menjelaskan bahwa pemerintah daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Secara de facto dan de jure Indonesia saat ini terdiri dari 34 provinsi (Direktorat Jenderal Otonomi Daerah). Provinsi dibagi menjadi 416 kabupaten dan 98 kota atau 7.024 daerah setingkat kecamatan dan 81.626 daerah setingkat desa. Tiap provinsi memiliki DPRD provinsi dan gubernur, sementara kabupaten memiliki DPRD kabupaten dan bupati, kemudian kota memiliki DPRD kota dan wali kota, semuanya dipilih oleh rakyat melalui pemilu dan pilkada.

Penyajian laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) merupakan suatu upaya pemerintah daerah dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan. Penyajian laporan keuangan pemerintah disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah. Sebuah standar diperlukan sebagai petunjuk atau pedoman dalam rangka penyusunan laporan keuangan (Lutfia et al., 2018).

Salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan Negara yang terbuka adalah hak publik untuk memperoleh informasi sesuai dengan peraturan Perundang-undangan. Hak atas informasi menjadi penting karena semakin terbuka penyelenggaraan Negara untuk diawasi oleh publik, sehingga penyelenggaraan tersebut semakin dapat dipertanggungjawabkan. Hak setiap orang untuk memperoleh informasi juga relevan untuk meningkatkan kualitas pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik (Undang-Undang No.14 tahun 2008).

Pemerintah yang baik harus mampu menyediakan informasi publik secara transparan yang dapat dengan mudah di akses oleh masyarakat dan pihak yang berkepentingan (R. P. Nurhidayati & Sri, 2020).

Teknologi Internet merupakan salah satu bentuk perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang telah berkembang pesat dan mempengaruhi perekonomian yang ditandai dengan proses digitalisasi pertukaran informasi. Termasuk informasi mengenai penyampaian laporan keuangan Pemerintah agar lebih mudah untuk di akses. Selain internet, teknologi informasi dan komunikasi juga dapat berupa Intranet, ekstranet dan *e-governance* (Kurniati & Siddi, 2020).

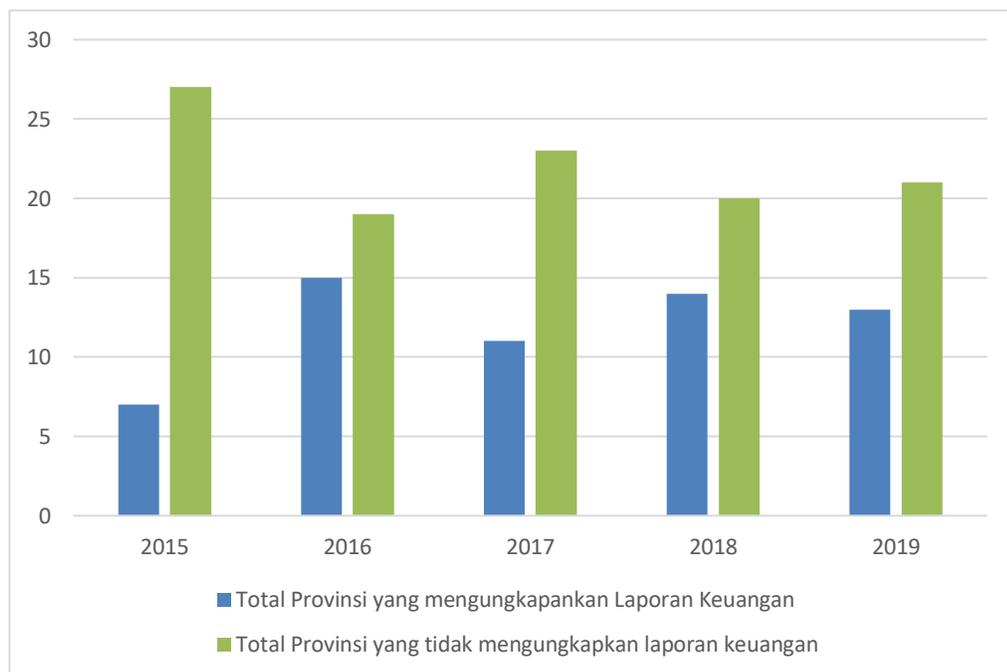
Internet Financial Reporting melalui *e-governance* merupakan salah satu media yang memenuhi aspek *value of money* atau disebut juga 3E (Efisiensi, Efektivitas dan Ekonomi) untuk mengumumkan dan menyediakan informasi mengenai laporan keuangan kepada para pemangku kepentingan publik (Prima & Verawaty, 2018). Salah satu bentuk transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah dalam riset yang telah dilakukan di beberapa Negara adalah dengan mempublikasikan laporan keuangan melalui media Internet (Kurniati & Siddi, 2020).

1.2 Latar Belakang Penelitian

Kata *Disclosure* merupakan langkah terakhir dari proses akuntansi berupa penyajian informasi yang relevan berupa laporan keuangan (R. P. Nurhidayati & Sri, 2020). Bila dikaitkan dengan pengungkapan informasi, pengungkapan mengandung pengertian bahwa pengungkapan informasi tersebut harus memberikan penjelasan yang cukup serta dapat mewakili keadaan sebenarnya dalam perusahaan.

Pada saat ini pemerintah daerah telah menggunakan *website* melalui *e-government* untuk melakukan pengungkapan informasi keuangan, dengan adanya *website* tersebut pemerintah berharap proses publikasi dapat berjalan dengan mudah (Prima & Verawaty, 2018). Dalam (Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012) mengenai Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi jangka panjang tahun 2012-2025, praktik pelaporan keuangan melalui internet merupakan salah satu

upaya yang dilakukan pemerintah dalam menciptakan pemerintah yang bersih dan bebas dari korupsi (*Good governance & clean governance*). Tindakan korupsi yang berlangsung dalam pemerintah daerah dapat menimbulkan krisis kepercayaan *stakeholder* pemerintah, sehingga perlu adanya tindak lanjut dalam optimalisasi pengungkapan laporan keuangan melalui internet sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah (Destya, 2019). Meningkatkan partisipasi publik dan pengawasan anggaran terhadap pemerintah dalam menjamin pengelolaan keuangan daerah berjalan sesuai dengan Undang-Undang merupakan manfaat lain dari pengungkapan laporan keuangan melalui media internet (Destya, 2019).



Gambar 1.1 Provinsi yang melakukan Pengungkapan Laporan Keuangan

Sumber: Data diolah penulis (2021)

Berdasarkan *mini riset* yang telah dilakukan penulis, data diatas didapatkan melalui masing-masing *website* resmi milik pemerintah daerah yang menjelaskan tentang perkembangan jumlah provinsi yang melakukan pengungkapan atas laporan keuangan melalui *website* resmi pemerintah pada tahun 2015-2019. Pada tahun 2015 hanya sebanyak 7 provinsi yang melakukan pengungkapan laporan keuangan,

sisanya sebanyak 27 Pemerintah Provinsi tidak melakukan pengungkapan melalui *website* pemerintah daerah. Pada tahun 2016 jumlah provinsi yang melakukan pengungkapan laporan keuangan meningkat dibandingkan tahun 2015 yaitu sebanyak 15 provinsi yang melakukan pengungkapan, sedangkan sebanyak 19 provinsi tidak melakukan pengungkapan. Pada tahun 2017 jumlah provinsi yang melakukan pengungkapan menurun dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu hanya 11 provinsi yang melakukan pengungkapan, sisanya sebanyak 23 provinsi tidak melakukan pengungkapan melalui *website*. Pada tahun 2018 sebanyak 14 provinsi melakukan pengungkapan sedangkan sebanyak 20 pemerintah tidak melakukan pengungkapan dan pada tahun 2019 kembali mengalami penurunan yaitu hanya 13 Pemerintah Provinsi yang melakukan pengungkapan sedangkan sebanyak 21 provinsi lainnya tidak melakukan pengungkapan. Pada tahun 2020 berdasarkan observasi yang dilakukan oleh penulis, dari 34 Provinsi di Indonesia yang melakukan pengungkapan informasi keuangan berupa laporan keuangan dalam *website* resmi pemerintah hanya sebanyak 11 Pemerintah Provinsi sedangkan sisanya belum melakukan pengungkapan informasi keuangan pada *website* resmi Pemerintah Provinsi.

Dalam pelaporan keuangan terdapat dua jenis pengungkapan yaitu pengungkapan wajib dan pengungkapan sukarela (R. P. Nurhidayati & Sri, 2020). Pengungkapan wajib (Mandatory Disclosure) merupakan pengungkapan semua informasi yang diungkapkan dalam laporan keuangan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Setiap perusahaan wajib melaporkan laporan keuangannya kepada publik, sedangkan pengungkapan secara sukarela (Voluntary Disclosure) adalah pengungkapan yang dilakukan perusahaan diluar apa yang diwajibkan oleh standar akuntansi atau peraturan badan pengawas (R. P. Nurhidayati & Sri, 2020). Menurut Penelitian yang dilakukan oleh (Pratama et al., 2015) pengungkapan informasi keuangan maupun non keuangan pada website Pemerintah di Indonesia masih bersifat sukarela (Voluntary), sehingga masih banyak pemerintah daerah yang pasif dalam mengungkapkan laporan keuangannya pada website resmi pemerintah daerah.

Sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang No.14 tahun 2008 mengenai keterbukaan informasi publik, setiap Badan Publik wajib mencantumkan informasi publik secara berkala, informasi yang dimaksud meliputi informasi yang berkaitan dengan Badan Publik, kegiatan Badan Publik, kinerja Badan Publik, Laporan Keuangan dan Informasi lain yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan. Dengan adanya informasi tersebut diharapkan para pengguna dapat memanfaatkannya dengan semaksimal mungkin (R. P. Nurhidayati & Sri, 2020).

Transparansi merupakan salah satu aspek yang mendasar untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik. Salah satu wujud pemerintah yang baik mensyaratkan adanya keterbukaan, keterlibatan, serta kemudahan akses bagi masyarakat mengenai proses penyelenggaraan pemerintah. Transparansi dapat diukur melalui indikator kesediaan, kelengkapan informasi, keterbukaan proses dan kerangka regulasi yang menjamin transparansi (Resti Febria, 2018). Pemerintah dapat melakukan transparansi dengan cara melakukan mengungkapkan laporan keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) melalui *website* pemerintah daerah (Idris, 2018). Menurut Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, laporan keuangan pemerintah daerah terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan (CALK). Pengukuran pada penelitian ini mengacu pada Penelitian yang dilakukan oleh (Destya, 2019) yang diukur dengan menggunakan indeks *skoring (checklist)* tingkat pengungkapan informasi keuangan pada *website* resmi pemerintah daerah dan juga disesuaikan dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 188.52/1797/SJ/2012 tentang Peningkatan Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah.

Berdasarkan penelitian sebelumnya, yang berkaitan dengan pengungkapan informasi keuangan pemerintah daerah dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu populasi, indeks pembangunan manusia (IPM), opini audit, dan rasio kemandirian

(Shafira, 2019), kondisi keuangan, kekayaan daerah, kesejahteraan masyarakat (R. P. Nurhidayati & Sri, 2020), ukuran pemda, ukuran legislatif, *Intergovernmental Revenue*, umur administratif, diferensiasi fungsional, spesialisasi pekerjaan (Simbolon & Kurniawan, 2018), persaingan politik, rasio pembiayaan hutang, pendapatan per kapita (Hadianto & Murtin, 2020), belanja daerah, tingkat kemandirian (Fachru, 2018). Dalam Penelitian ini peneliti menggunakan tiga Faktor yang pengaruhnya tidak konstan yaitu kekayaan daerah, umur administratif dan indeks pembangunan manusia. Penulis memilih ketiga faktor tersebut karena faktor-faktor tersebut dapat menjadi tolak ukur dalam melihat sejauh mana pemerintah melakukan Pertanggungjawaban dalam pengelolaan keuangan pemerintah yang dilakukan dengan cara pengungkapan melalui *website* dengan melihat pendapatan asli daerah, umur administratif dan indeks pembangunan manusia.

Faktor pertama yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah Kekayaan Daerah. Kekayaan daerah merupakan kemampuan yang dimiliki pemerintah dalam mengelola sumber daya milik daerahnya serta pendapatan lain yang bersumber dari daerah tersebut (Putri dan Azka, 2019) dalam Penelitian (R. Nurhidayati, 2020). Menurut (Setyowati, 2016) variabel kekayaan pemerintah daerah diproksikan dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan asli daerah merupakan penerimaan di dalam suatu daerahnya sendiri yang bersumber dari masyarakat yang terdiri dari Pajak daerah, retribusi daerah serta penerimaan lainnya (Lutfia et al., 2018). Pemerintah daerah yang memiliki kekayaan daerah yang tinggi maka semakin kompleks pengelolaan keuangannya, sehingga informasi keuangan yang harus diungkapkan juga semakin besar (Pratama et al., 2015). Tingginya kekayaan daerah juga meningkatkan keingintahuan masyarakat akan pengelolaan kekayaan daerah dikarenakan tingginya kekhawatiran masyarakat akan kemungkinan adanya penyelewengan dana dalam pengelolaan keuangan tersebut (Prima & Verawaty, 2018). Dalam konteks teori *signaling*, pemerintah berusaha untuk memberikan sinyal

yang baik kepada masyarakat dengan tujuan agar masyarakat dapat terus mendukung jalannya pemerintah dengan baik (Setyowati, 2016).

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh (Setyowati, 2016) menunjukkan kekayaan daerah memiliki pengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan Pemerintah Daerah. Penelitian yang dilakukan oleh (R. Nurhidayati, 2020) menunjukkan kekayaan daerah berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan laporan keuangan pada *website* resmi pemerintah daerah. Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Istikomah & Mutmainah, 2017) juga menunjukkan hasil kekayaan daerah berpengaruh positif terhadap pengungkapan laporan keuangan pada *website* resmi pemerintah daerah. Namun hasil penelitian yang dilakukan oleh (Simbolon & Kurniawan, 2018) dan (Fachru, 2018) menunjukkan kekayaan daerah tidak berpengaruh terhadap pengungkapan laporan keuangan.

Faktor kedua yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah Umur Administratif. Umur administratif merupakan tahun dibentuknya suatu pemerintahan berdasarkan dengan Undang-undang pembentukan daerah (Lutfia et al., 2018). Pemerintah daerah yang memiliki umur administratif yang lama maka akan semakin memiliki pengalaman yang lebih baik dalam menyajikan informasi keuangan berupa laporan keuangan pemerintah sesuai dengan Standar Akuntansi Publik (Simbolon & Kurniawan, 2018). Semakin banyak pengalaman dalam menyajikan laporan keuangan disebabkan karena laporan keuangan pemerintah pada tahun sebelumnya telah dilakukan pemeriksaan oleh BPK sehingga hasil evaluasinya ditindaklanjuti untuk memperbaiki kekurangan dalam penyajian laporan keuangan, sehingga laporan keuangan pada tahun selanjutnya dapat semakin baik sesuai dengan Standar Akuntansi (Gina, 2017). Dengan mendasar kepada teori *signalling*, Pemerintah daerah yang telah lama berdiri akan memberikan sinyal kepada *stakeholder* dengan cara menyajikan informasi keuangan pada *website* berdasarkan pengalaman selama pemerintah berdiri untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah (Destya, 2019).

Berdasarkan Penelitian yang dilakukan oleh (Destya, 2019) menunjukkan umur administratif berpengaruh positif terhadap *Internet Financial Reporting*. Penelitian yang dilakukan oleh (Rahim & Martani, 2016) menunjukkan bahwa umur administratif memiliki pengaruh terhadap pengungkapan informasi keuangan pemerintah daerah, namun dalam penelitian (Simbolon & Kurniawan, 2018) umur administratif tidak memiliki pengaruh terhadap pengungkapan informasi laporan keuangan pemerintah daerah.

Faktor ketiga yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu Indeks Pembangunan Manusia. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) IPM merupakan alat ukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. IPM dibentuk melalui tiga pendekatan dimensi dasar yaitu dimensi umur panjang dan sehat, dimensi pengetahuan dan dimensi kehidupan yang layak. Semakintinggi pembangunan masyarakat, maka keinginan masyarakat juga semakin beragam yang akhirnya akan menimbulkan tuntutan masyarakat terhadap pemerintah agar pemerintah memberikan laporan keuangan yang lebih rinci kepada masyarakat (Setyowati, 2016). Sumber Daya Manusia memiliki posisi yang strategis dalam suatu organisasi, artinya manusia memegang peran penting dalam melakukan aktivitas guna mencapai suatu tujuan dan kondisi yang lebih baik. Oleh sebab itu perlu adanya manajemen terhadap SDM yang berkualitas, loyal dan berprestasi. Pemerintah memiliki peran penting dalam menghasilkan SDM yang berkualitas dan siap memasuki pasar kerja. Peningkatan kualitas SDM dapat dilakukan dengan Diklat, kompetensi, pembinaan dan lain-lain (Kemenko PMK). Diklat pegawai negeri merupakan upaya-upaya yang dilakukan bagi pegawai negeri untuk meningkatkan kepribadian, pengetahuan dan kemampuan sesuai dengan tuntutan persyaratan jabatan dan pekerjaannya sebagai pegawai negeri (Anita et al., 2019). Pemerintah yang memiliki SDM yang berkualitas akan memenuhi tanggung jawabnya kepada pemerintah untuk melakukan transparansi keuangan melalui media internet yang dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat. Dengan mendasar kepada teori

Signalling, Pemerintah yang memiliki kualitas SDM (Pegawai Pemerintah) yang baik akan menyadari betapa pentingnya transparansi anggaran yang merupakan salah satu tanggung jawab pemerintah dalam pengelolaan anggaran yang bersumber dari masyarakat, sehingga pemerintah akan menyajikan informasi keuangan berupa laporan keuangannya melalui media internet untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat publik terhadap pemerintah.

Penelitian yang telah dilakukan oleh (Setyowati, 2016) dan (Shafira, 2019) menunjukkan bahwa indeks pembangunan manusia memiliki pengaruh positif terhadap pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah, namun pada penelitian (Destya, 2019) indeks pembangunan manusia tidak memiliki pengaruh terhadap praktik *Internet Financial Reporting* dalam *website* pemerintah daerah.

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya, Penulis merasa perlu untuk meneliti lebih jauh dengan mengambil penelitian dengan judul **“Pengaruh Kekayaan Daerah, Umur Administratif dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Pengungkapan Informasi Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus pada Pemerintah Provinsi di Indonesia Tahun 2019)”**.

1.3 Perumusan Masalah

Salah satu wujud transparansi pemerintah daerah dapat dilakukan dengan cara melakukan pengungkapan informasi keuangan berupa laporan keuangan Pemerintah Daerah pada *website* resmi pemerintah daerah (R. Nurhidayati, 2020). Disesuaikan dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 188.52/1797/SJ/2012 tentang Peningkatan Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah, Pemerintah diharapkan dapat mempublikasikan Informasi Keuangan berupa Ringkasan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD), Ringkasan Rencana Kerja dan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (RKA PPKD), Rancangan Perda APBD, Rancangan Perda Perubahan APBD, Perda APBD, Perda Perubahan APBD, Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD, Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) PPKD, Laporan Realisasi Anggaran SKPD, Laporan Realisasi Anggaran PPKD, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang telah diaudit dan Opini BPK RI. Namun pada kenyataannya, masih terdapat beberapa provinsi yang belum optimal dalam melakukan pengungkapan informasi keuangan tersebut.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

- 1) Bagaimana kekayaan pemerintah daerah, umur administratif, indeks pembangunan manusia dan pengungkapan informasi keuangan Pemerintah Provinsi di Indonesia tahun 2019?
- 2) Bagaimana pengaruh kekayaan pemerintah daerah, umur administratif dan indeks pembangunan manusia secara simultan terhadap pengungkapan informasi keuangan pada *website* Pemerintah Provinsi tahun 2019?
- 3) Bagaimana pengaruh secara parsial :
 - A. Pengaruh kekayaan Pemerintah daerah secara parsial terhadap pengungkapan informasi keuangan pada *website* Pemerintah Provinsi tahun 2019?

- B. Pengaruh umur administratif Pemerintah daerah secara parsial terhadap pengungkapan informasi keuangan pada *website* Pemerintah Provinsi tahun 2019?
- C. Pengaruh indeks pembangunan manusia secara parsial terhadap pengungkapan informasi keuangan pada *website* Pemerintah Provinsi tahun 2019?

1.4 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana Pemerintah Provinsi Se-Indonesia yang memiliki *website* mengungkapkan informasi keuangan dalam situs resminya. Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari Penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kekayaan pemerintah daerah, umur administratif, indeks pembangunan manusia dan pengungkapan informasi keuangan Pemerintah Provinsi di Indonesia tahun 2019.
2. Untuk mengetahui pengaruh kekayaan pemerintah daerah, umur administratif dan indeks pembangunan manusia (IPM) secara simultan terhadap pengungkapan informasi keuangan pada *website* Pemerintah Provinsi tahun 2019.
3. Untuk mengetahui Pengaruh secara parsial dari:
 - A. Kekayaan Pemerintah Daerah terhadap pengungkapan informasi keuangan pada *website* Pemerintah Provinsi tahun 2019.
 - B. Umur Administratif terhadap pengungkapan informasi keuangan pada *website* Pemerintah Provinsi tahun 2019.
 - C. Indeks Pembangunan Manusia terhadap pengungkapan informasi keuangan pada *website* Pemerintah Provinsi tahun 2019.

1.5 Manfaat Penelitian

Hasil dari Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara langsung maupun tidak langsung kepada pihak yang berkepentingan.

1.5.1 Aspek Teoritis

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi pembaca mengenai faktor yang mempengaruhi pengungkapan informasi keuangan melalui *website* pemerintah daerah .
2. Penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi serta tambahan informasi untuk peneliti selanjutnya yang tertarik melakukan penelitian dengan topik yang sama yaitu pengungkapan informasi keuangan Pemerintah Daerah pada seluruh Provinsi di Indonesia.

1.5.2 Aspek Praktis

1. Bagi Pemerintah Daerah

Dengan adanya penelitian ini diharapkan setiap daerah mulai menyesuaikan dengan adanya perkembangan teknologi informasi. Diharapkan dengan adanya perkembangan teknologi dapat dimanfaatkan dengan maksimal sehingga dapat membantu pemerintah dalam mempermudah penyampaian informasi. Penelitian ini juga diharapkan memotivasi pemerintah daerah untuk mengembangkan *website* resmi yang telah ada guna menyampaikan informasi yang dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan, seperti masyarakat.

2. Bagi Publik

Dengan adanya penelitian ini diharapkan memberikan informasi mengenai informasi keuangan yang dapat diakses melalui *website* resmi pemerintah daerah.

1.6 Sistematika Penulisan Tugas Akhir

Berisi tentang sistematika dan penjelasan ringkas laporan penelitian yang terdiri dari Bab I sampai Bab V dalam laporan penelitian.

BAB 1 PENDAHULUAN

Bab ini merupakan penjelasan secara umum, ringkas dan padat yang menggambarkan dengan tepat isi penelitian. Isi bab ini meliputi: Gambaran Umum Objek Penelitian, Latar Belakang Penelitian, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Sistematika Penulisan Tugas Akhir.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi teori dari umum sampai ke khusus, disertai penelitian terdahulu dan dilanjutkan dengan kerangka pemikiran penelitian yang diakhiri dengan hipotesis jika diperlukan.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menegaskan pendekatan, metode, dan teknik yang digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis temuan yang dapat menjawab masalah penelitian. Bab ini meliputi uraian tentang: Jenis Penelitian, operasionalisasi variabel, populasi dan sampel, pengumpulan data, uji validitas dan reabilitas, serta teknik analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian dan pembahasan diuraikan dengan secara sistematis sesuai dengan perumusan serta tujuan penelitian dan disajikan dalam sub judul tersendiri. Bab ini berisi dua bagian: Bagian pertama menyajikan hasil penelitian dan bagian kedua menyajikan pembahasan atau analisis dari hasil penelitian. Setiap aspek pembahasan dimulai dari hasil analisis data, kemudian diinterpretasikan dan selanjutnya diikuti oleh penarikan kesimpulan.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan merupakan jawaban dari pertanyaan penelitian, kemudian menjadi saran yang berkaitan dengan manfaat penelitian.